

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYELENGGARAAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI PUSKESMAS SEMATA KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK

Oleh:

BRUNO TANGKAH^{1*}

NIM. E1012151082

Dwi Haryono², Dewi Utami²

*Email: brunotangkah@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, yang belum berjalan optimal, karena kurangnya antusias dan partisipasi warga dalam mendukung program imunisasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan kejadian yang terjadi dilapangan, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menurut teori George C. Edward III dalam Agustino (2017, 149) menunjukkan bahwa :1) Faktor komunikasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata masih dapat dikatakan kurang. Karena komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan masih belum tepat, dimana komunikasi tersebut melalui grup whatsapp posyandu dan facebook puskesmas Semata, pada kenyataan tidak semua masyarakat dapat mengakses *facebook*. 2) Faktor sumberdaya dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata menunjukkan, masih ada kekurangan alat penunjang kegiatan imunsasi (penimbang, alat ukur tinggi badan, meja dibeberapa posyandu) yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan imunisasi. 3) Faktor disposisi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata sudah cukup baik, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi baik tenaga kesehatan dan kader posyandu sudah mendapatkan insentif, yang diharapkan membuat para pelaksana kegiatan imunisasi menjadi semangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan. 4) Faktor struktur birokrasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata masih terdapat beberapa hambatan dalam pembagian tugas tersebut dimana tingkat kehadiran, kemampuan dan ketelitian kader masih kurang maksimal. Saran dalam penelitian ini diharapkan pihak Puskesmas Semata lebih meningkatkan komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan imunisasi kepada masyarakat, serta para pelaksana (bidan desa) yang bertanggungjawab di posyandu, diharapkan lebih memantau kegiatan imunisasi dilapangan dan memberikan bimbingan kepada kader.

Kata kunci : Implementasi, Program, Imunisasi, Puskesmas

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

A.PENDAHULUAN

1.Latar belakang penelitian

Untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas bermutu dan berkualitas tentunya berkaitan erat dengan masalah kesehatan. Dalam hal ini Pemerintah sangat memperhatikan tentang kesehatan masyarakat khususnya anak-anak sebagai penerus bangsa. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan Pemerintah melakukan berbagai program, melalui Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas serta Posyandu ditingkat rendah yang berada di lingkungan masyarakat.

Urusan kesehatan menjadi prioritas penting bagi Pemerintah untuk dapat melayani masyarakat kecil yang dulunya kurang diperhatikan. Sekarang adanya jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat), kartu sehat dan sebagai prioritas buat masyarakat kecil. Khusus bagi batita (bayi berumur tiga tahun) diadakan program imunisasi, yang diberikan sejak bayi berusia nol bulan sampai tiga tahun.

Program imunisasi anak adalah salah satu contoh bentuk kepedulian pemerintah dalam menangani kesehatan. Program ini bertujuan untuk menekan angka kematian dan kesakitan pada anak. Dengan adanya program ini diharapkan anak Indonesia terhindar dari penyakitpenyakit berbahaya, Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

supaya mereka memiliki kesempatan untuk beraktifitas, bermain, dan belajar tanpa ada gangguan masalah kesehatan.

Menurut Permenkes RI Nomor 12 tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan umum Imunisasi untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Tujuan khusus program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tercapainya cakupan Imunisasi dasar lengkap (IDL) pada bayi sesuai target nasional.
- 2) Tercapainya Universal Child Immunization/UCI (Persentase minimal 93% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan) di seluruh desa/kelurahan.
- 3) Tercapainya target Imunisasi lanjutan pada anak umur di bawah dua tahun (baduta) dan pada anak usia sekolah dasar serta Wanita Usia Subur (WUS).
- 4) Tercapainya reduksi, eliminasi, dan eradikasi penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi.
- 5) Tercapainya perlindungan optimal kepada masyarakat yang akan berpergian ke daerah endemis penyakit tertentu.
- 6) Terselenggaranya pemberian Imunisasi yang aman serta pengelolaan limbah medis (safety injection practise and waste disposal management).

Keberhasilan program imunisasi harus dipertahankan dengan cakupan tinggi dan merata di seluruh wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya daerah kantong atau endemis yang akan mempermudah terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB). Dalam rangka mengurangi resiko penularan virus dari negara lain, seperti polio pemerintah secara nasional telah melaksanakan Pekan Imunisasi Nasional (PIN). Untuk mendeteksi dini terjadinya pengikatan kasus penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, telah dilakukan upaya surveilans Epidemiologi.

Dalam pencapaian UCI (*Universal Child Immunization*) Persentase minimal 93% bayi yang mendapat IDL disuatu desa/kelurahan, masih terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan antara lain karena kurang perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap program imunisasi, kurangnya dana operasional untuk imunisasi baik rutin maupun tambahan, dan tidak tersedianya fasilitas dan infrastruktur. Selain itu juga kurangnya koordinasi lintas sektor termasuk pelayanan kesehatan swasta, kurang sumber daya yang memadai serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang program dan manfaat imunisasi.

Puskesmas sebagai salah satu tempat pelayanan kesehatan dalam kegiatannya melibatkan partisipasi masyarakat yang Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

dilaksanakan oleh kaderkader kesehatan yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan mengenai pelayanan kesehatan dasar. Tujuan dari program puskesmas adalah meningkatkan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan kemampuan hidup sehat.

Puskesmas Semata merupakan salah satu puskesmas yang melaksanakan program imunisasi dasar lengkap di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, pada observasi awal diketahui bahwa program imunisasi di puskesmas Semata masih belum berjalan optimal, karena kurangnya antusias dan partisipasi warga dalam mendukung program imunisasi tersebut. Akses jalan yang tidak mendukung di desa-desa binaan puskesmas Semata salah satunya Desa Pak Mayam untuk menuju puskesmas yang memberikan pelayanan program imunisasi tersebut, dimana selain jalan desa yang rusak, warga juga harus melewati jalur air, sehingga banyak bayi yang tidak mendapatkan imunisasi.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun, terdapat sedikit bayi yang datang untuk mendapatkan imunisasi dasar, dimana hanya ada 15 bayi di Desa Pak Mayam yang datang untuk melakukan imunisasi dasar yang terdiri dari 3 Dusun, dimana Desa Pak

Mayam ini adalah Desa binaan Puskesmas Semata dan terdapat 13

bayi yang tidak mendapatkan imunisasi. Target tercapainya cakupan imunisasi dasar lengkap Kabupaten Landak minimal 95%. Sedangkan bayi yang melakukan imunisasi dasar lengkap hanya mencapai 53%. Hal ini menunjukkan program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang belum mencapai target dan sosialisasi yang diberikan belum optimal.

Peran humas sangat penting bagi sebuah organisasi, perusahaan dan lembaga pemerintahan sekaligus. Dalam memenuhi tanggungjawab sosial, perusahaan atau lembaga pemerintahan. Dengan adanya humas masyarakat akan mendapatkan kejelasan tentang permasalahan yang sedang terjadi. Strategi humas ialah untuk membuat publik percaya kepada opini humas dalam membangun kampanye atau sosialisasi dalam bentuk positif. Khususnya humas Dinas Kesehatan Kabupaten Landak bukan hanya sekedar untuk mensosialisasikan program imunisasi tetapi untuk menyadarkan masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan bila balita dan anak di usia dini tidak mendapatkan imunisasi dengan rutin.

Sehubungan dengan manfaat pentingnya pemberian imunisasi dasar pada anak dengan berbagai pertimbangan serta Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

alasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian yaitu “Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Program imunisasi di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih belum mencapai target, dimana hanya 53% bayi yang melakukan imunisasi dasar lengkap.
2. Sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat belum maksimal, sehingga kurangnya partisipasi warga dalam mendukung program imunisasi tersebut.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan, penulis merumuskan masalah penelitian menjadi pertanyaan penelitian yaitu apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak ?

4. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak.

5. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini sebagai bahan bacaan di perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Serta dapat memberikan masukan bagi pengembangan teori-teori Ilmu Administrasi Publik khususnya mengenai Implementasi Program.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan. Menjadi masukan atau saran, bagaimana Puskesmas melakukan sosialisasi dengan menjelaskan apa imunisasi dasar lengkap itu sebenarnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi sasaran

Bruno Tangkah
Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen untuk mengatur penduduk dari atas kebawah.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (2005, 3) bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Menurut pendapat di atas kebijakan mengandung unsur tindakan untuk mencapai tujuan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah.

Model Implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Agustino (2017, 149) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi

berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

- a) Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (misscommunication).
- b) Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (streetlevel-bureuarats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang

lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c) Konsistensi; perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

- a) Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

- b) Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c) Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disatu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d) Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.
- ### 3. Disposisi
- Dalam disposisi, ada hal-hal penting yang perlu dicermati sebagai berikut:
- a) Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.
- b) Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan

mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

4. Struktur Birokrasi

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. **Gambar 1**

Kerangka Pikir

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan
Imunisasi

Identifikasi Masalah

1. Program imunisasi di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak masih belum berjalan optimal, karena kurangnya antusias dan partisipasi warga

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

dalam mendukung program imunisasi tersebut.

2. Akses jalan yang tidak mendukung dari beberapa desa salah satunya Desa Pak Mayam untuk menuju puskesmas yang memberikan pelayanan program imunisasi tersebut, dimana selain jalan desa yang rusak, warga juga harus melewati jalur air.

Teori

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2017, 149) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Output

Diketahuinya Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak

C.METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang menunjukkan fakta sosial yang ada dan menghasilkan berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang, serta perilaku yang diamati yang menunjukkan “Bagaimana Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar di Dusun Menjalin Desa Pak Mayam Kabupaten Landak”. Metode kualitatif juga berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu

peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pak Mayam Kabupaten Landak. Pertimbangan memilih desa ini karena kurang optimalnya program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak khususnya di Desa Pak Mayam. Subjek penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Puskesmas Semata;
2. Tenaga Kesehatan Puskesmas Semata;
3. Kepala Desa Pak Mayam Kecamatan Ngabang;
4. Masyarakat disekitar berjumlah 3 orang.

Penelitian ini memiliki objek sebagai landasan untuk meneliti yaitu "Implementasi program imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak". Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

D. PEMBAHASAN

Puskesmas semata merupakan salah satu puskesmas yang melaksanakan program imunisasi dasar lengkap di Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, pada observasi awal diketahui bahwa program imunisasi di Puskesmas semata masih belum berjalan optimal, karena kurangnya antusias dan

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

partisipasi warga dalam mendukung program imunisasi tersebut.

Akses jalan yang tidak mendukung di desa-desa binaan Puskesmas semata salah satunya Desa Pak Mayam untuk menuju Puskesmas yang memberikan pelayanan program imunisasi tersebut, dimana selain jalan desa yang rusak, warga juga harus melewati jalur air, sehingga banyak bayi yang tidak mendapatkan imunisasi. dengan menggunakan teknik wawancara dengan sejumlah informan dan dari berbagai sumber lain yang berupa dokumen dan arsip dianalisis menggunakan teori George C. Edward III dalam Agustino (2017, 149) untuk mencapai suatu keberhasilan terhadap implementasi kebijakan publik, maka diperlukan empat faktor, yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi
Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu :

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).

Dari informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa hambatan yang ada dalam proses penyampaian informasi terkait kegiatan imunisasi, banyak masyarakat yang tidak datang membawa anaknya mengikuti kegiatan imunisasi tersebut dengan alasan pekerjaan. Pada kenyataannya dilapangan peneliti juga melihat bahwa dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi di desa Pak Mayam, tidak banyak masyarakat datang untuk membawa anaknya mendapatkan imunisasi.

2. Kejelasan

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-levelbureuarats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (*tidak ambigu/mendua*) ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implemmentasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibelitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan

menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Informasi yang diberikan terkait kebijakan program imunisasi sudah memberikan kejelasan dan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakannya, seperti yang sudah disampaikan oleh kepala puskesmas semata, mengenai kejelasan terkait kebijakan program imunisasi yang disampaikan sudah disesuaikan dengan regulasi tentang pelaksanaan imunisasi itu sendiri. Untuk masalah kepatuhan, hanya persoalan dimasa pandemi, dimana masih ada masyarakat yang mengikuti kegiatan tidak dengan protokol kesehatan, yaitu idak menggunakan masker.

Dalam menyampaikan informasi program imunisasi, puskesmas semata dibantu dengan pihak desa baik itu kades, kader posyandu, bidan desa jadi masyarakat bisa mengerti dengan jelas mengenai apa yang disampaikan, serta dapat diterima dengan oleh masyarakat, meskipun tidak menutup kemungkinan masih ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti mengenai program imunisasi tersebut dan bertanya kembali berdasarkan informasi dari kepala desa Pak Mayam.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Konsistensi puskesmas semata dalam komunikasi penyampaian informasi kepada pihak desa maupun masyarakat yang bersangkutan, mengenai pelaksanaan program imunisasi sesuai dengan tujuan dan prosedur kebijakan terutama dimasa pandemi.

Dari keseluruhan informasi yang didapatkan menunjukkan bahwa faktor komunikasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata masih dapat dikatakan kurang. Karena komunikasi yang dilakukan pihak puskesmas Semata belum tepat, dimana komunikasi tersebut melalui grup *whatsapp* posyandu dan *facebook* puskesmas Semata, pada kenyataan tidak semua masyarakat dapat mengakses *facebook*.

Akan tetapi, puskesmas semata sudah berupaya melakukan komunikasi penyampaian informasi terkait kegiatan imunisasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu puskesmas semata juga melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi lintas sektor terkait pelaksanaan program imunisasi dengan melibatkan dinas kesehatan, desa dan juga masyarakat. Penyampaian informasi terkait program

Bruno Tangkah
Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

imunisasi tersebut juga disampaikan dengan jelas, patuh dan konsisten sesuai dengan arahan, regulasi atau petunjuk teknis yang ada dari kementerian kesehatan.

b.Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen sebagai berikut:

1. Staf

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi dari puskesmas semata sudah mencukupi yang terdiri dari 8 kader posyandu, 1 atau 2 orang bidan dan 1 orang PJ (penanggungjawab) program imunisasi, yang bertanggung jawab untuk seluruh

kegiatan imunisasi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian serta pencatatan dan pelaporan kegiatan posyandu setelah melakukan imunisasi.

Keahlian dan kemampuan petugas kesehatan juga sudah cukup baik, meskipun keahlian dari kader posyandu masih kurang, tetapi puskesmas semata selalu memberikan binaan kepada kader sebelum kegiatan posyandu dan selalu melakukan peningkatan kapasitas petugas kesehatan. Serta tidak ada kriteria khusus dalam memilih komunikator dalam kegiatan imunisasi, baik tenaga kesehatan maupun kader boleh menjadi komunikator untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

Pengalaman dan kepatuhan para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan

program imunisasi sudah cukup baik. Karena baik petugas kesehatan maupun kader sudah diberikan pelatihan atau binaan sebelum kegiatan dilaksanakan, dan juga setelah kegiatan dilaksanakan puskesmas semata melakukan evaluasi. Serta para pelaksana sudah melaksanakan kegiatan imunisasi dengan patuh berdasarkan prosedur yang ada dan jadwal yang telah ditentukan.

3. Wewenang

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.

Puskesmas semata mempunyai wewenang sebagai penyedia vaksin dan petugas kesehatan yang melaksanakan kegiatan imunisasi berdasarkan aturan atau prosedur dari kementerian kesehatan. Serta pihak yang terlibat dalam wewenang pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap adalah kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten dan juga puskesmas, serta desa yang didampingi oleh kader posyandu.

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

4. Fasilitas

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan imunisasi di puskesmas semata sudah memadai. Akan tetapi alat untuk pelaksanaan kegiatan masih belum lengkap, untuk di beberapa dusun seperti 2 dusun yang ada di desa Pak Mayam. Menurut informan kepala puskesmas semata mengatakan bahwa kurangnya penimbangan bayi dan pengukur tinggi badan balita di beberapa posyandu. Kemudian untuk fasilitas lainnya seperti kursi, meja kader dan lainnya masih dikatakan minim. Kendaraan juga menjadi kendala bagi pelaksana dan koordinator untuk pergi melaksanakan imunisasi ke luar gedung (posyandu) yang tidak menggunakan kendaraan puskesmas melainkan kendaraan pribadi dan ongkos pribadi.

Faktor sumberdaya dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata dilihat dari sumber daya

Bruno Tangkah
Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

sudah cukup baik, meskipun masih kekurangan alat penunjang kegiatan imunisasi di beberapa posyandu, tapi tidak menghambat pelaksanaan kegiatan imunisasi tersebut. Jumlah petugas kesehatan juga cukup memadai karena puskesmas semata dibantu oleh kader posyandur yang ada dimana terdiri dari 8 orang kader. Serta dalam wewenangnya puskesmas semata mempunyai wewenang sebagai penyedia vaksin dan pelaksana kegiatan imunisasi berdasarkan aturan atau prosedur dari kementerian kesehatan. Pihak-pihak yang terlibat dalam wewenang pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap juga terdiri dari kementerian kesehatan, dinas kesehatan provinsi atau kabupaten, puskesmas dan desa yang didampingi oleh kader posyandu.

c. Disposisi

Disposisi, hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, adalah sebagai berikut:

1. Pengangkatan birokrat

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-

orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

Sikap pelaksana kegiatan sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan kepala desa Pak Mayam berharap puskesmas tetap meningkatkan pelayanan puskesmas ke desa.

2. Insentif

Salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik.

Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi baik tenaga kesehatan dan kader posyandu mendapatkan insentif. Menurut pernyataan kepala puskesmas semata insentif untuk petugas kesehatan dari puskesmas semata dihitung berdasarkan perjalanan dinas petugas kesehatan tersebut, sedangkan kader posyandur untuk insentifnya merupakan tanggungjawab dari desa sendiri.

Mengenai peran penting insentif bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan

Bruno Tangkah
Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

kegiatan imunisasi diperoleh informasi dari kepala puskesmas dan tenaga kesehatan bahwa, untuk tidak melihat dari perannya melainkan sudah menjadi tanggungjawab pekerjaan. Kepala desa Pak Mayam memberikan pernyataan bahwa insentif ini sebagai ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat karena sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat di desa yang mengikuti kegiatan imunisasi tersebut.

Faktor disposisi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata sudah cukup baik, meskipun tetap harus meningkatkan pelayanan baik dari petugas kesehatan maupun kader posyandu. Karena pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi baik tenaga kesehatan dan kader posyandu sudah mendapatkan insentif, selain untuk tanda terima kasih kepada para pelaksana, insentif yang diberikan juga diharapkan membuat para pelaksanaan kegiatan imunisasi menjadi semangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan di desa.

d. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi, yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa

yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan imunisasi berdasarkan dengan regulasi ataupun prosedur yang ada, baik itu dari kementerian kesehatan maupun dari dinas kesehatan. Pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan implementasi kebijakan program imunisasi tersebut menurut pernyataan kepala puskesmas semata diperoleh informasi bahwa, semua pihak mempunyai tanggung jawab, seperti kementerian kesehatan yang mengeluarkan kebijakan, kemudian ada juga kebijakan dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten. Selanjutnya dilaksanakan oleh puskesmas dan dibantu dengan desa menyiapkan pos ataupun kader, serta masyarakat juga ikut Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

bertanggungjawab untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam pembagian tugas sudah dibuat 5 meja yang dibagi menjadi 4 meja untuk kader dan 1 meja untuk tenaga kesehatan, serta mengatur jadwal kegiatan yang berbeda di masing-masing dusun yang ada di setiap desa. Namun, tingkat kehadiran, kemampuan dan ketelitian kader masih menjadi kendala bagi pihak puskesmas semata untuk melakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap.

Dari keseluruhan hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata sudah cukup baik, puskesmas semata melakukan pembagian tugas, sesuai dengan meja atau yang dibutuhkan. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan dalam pembagian tugas tersebut dimana tingkat kehadiran, kemampuan dan ketelitian kader masih kurang. Namun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan imunisasi yang digunakan oleh puskesmas semata sudah berdasarkan regulasi ataupun prosedur yang ada, baik itu dari kementerian kesehatan maupun dari dinas kesehatan.

Serta semua pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan implementasi kebijakan

program imunisasi tersebut, mulai dari kementerian kesehatan yang mengeluarkan kebijakan, kemudian kebijakan dari dinas kesehatan provinsi dan kabupaten. Selanjutnya dilaksanakan oleh puskesmas dan dibantu dengan kader dari desa.

E.PENUTUP

1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan pembahasan pada uraian sebelumnya tentang masalah dan temuan-temuan dilapangan mengenai “Implementasi Program Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap di Puskesmas Semata Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Faktor komunikasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata masih dapat dikatakan kurang. Karena komunikasi secara tidak langsung yang dilakukan pihak puskesmas Semata masih belum tepat, dimana komunikasi tersebut melalui grup *whatsapp* posyandu dan *facebook* puskesmas Semata, pada kenyataan tidak semua masyarakat dapat mengakses *facebook*.

Serta Akan tetapi, puskesmas semata tetap berupaya melakukan komunikasi penyampaian informasi terkait kegiatan

imunisasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

b. Faktor sumber daya dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata menunjukkan, masih ada kekurangan alat penunjang kegiatan imunsasi seperti penimbangan, alat ukur tinggi badan dan meja dibeberapa posyandu, tapi hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kegiatan imunisasi khususnya di desa Pak Mayam. Jumlah petugas kesehatan juga cukup memadai karena puskesmas semata dibantu oleh kader posyandu yang ada, dimana terdiri dari 8 orang kader. Serta dalam wewenangnya puskesmas semata mempunyai wewenang sebagai pelaksana kegiatan imunisasi berdasarkan aturan atau prosedur dari kementerian kesehatan dan juga memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan program imunisasi dasar lengkap.

c. Faktor disposisi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata sudah cukup baik, pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan imunisasi baik tenaga kesehatan dan kader posyandu sudah mendapatkan

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

insentif, selain untuk tanda terima kasih kepada para pelaksana, insentif yang diberikan juga diharapkan membuat para pelaksana kegiatan imunisasi menjadi semangat dalam bekerja dan memberikan pelayanan di desa.

- d. Faktor struktur birokrasi dalam mempengaruhi implementasi program penyelenggaraan imunisasi dasar lengkap di Puskesmas Semata sudah melakukan pembagian tugas, sesuai dengan meja atau yang dibutuhkan, namun kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan dalam pembagian tugas tersebut dimana tingkat kehadiran, kemampuan dan ketelitian kader masih kurang maksimal.

2.Saran

Berdasarkan hasil penelitian di Puskesmas Semata mengenai pelaksanaan imunisasi, terdapat saran yang perlu disampaikan sebagai berikut :

- a. Diharapkan pihak Puskesmas Semata lebih meningkatkan komunikasi secara langsung dalam menyampaikan informasi terkait kegiatan imunisasi kepada masyarakat, serta memberikan perhatian kepada kader yang sudah atau pun belum memiliki pengetahuan dan wawasan seputar imunisasi serta memberi dukungna melalui penyuluhan yang dibawa langsung oleh mereka

sendiri sehingga menjadikan kader yang mandiri dn memiliki kepercayaan diri untuk kegiatan imunisasi dapat berjalan dengan baik.

- b. Untuk pelaksana (bidan desa) yang bertanggungjawab di posyandu, diharapkan pelaksana harus lebih memantau kegiatan imunisasi dilapanga serta memberi bimbingan kepada kader. Diharapkan kepada koordinator untuk mengajak serta lintas sektor yang bertanggungjawab dan ikut menyaksikan terselenggaranya kegiatan imunisasi di lapangan seperti lurah, kepling dan lainnya.
- c. Bagi pihak puskesmas untuk lebih menyediakan sarana pelayanan yang mendukung kegiatan di posyandu dan untuk Pemerintah Daerah agar menyediakan sarana kendaraan dinas untuk tenaga kesehatan imunisasi ke lapangan agar membantu dan memudahkan kegiatan.

F.REFERENSI

Buku

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. Impelementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.

Bruno Tangkah

Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Tanjungpura

- Agustino, Leo, 2017. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VII*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nurjanah, Siti, dkk. 2013. *Asuhan Kebidanan Postpartum*. Bandung : PT. Rafika Aditama
- Buku Panduan Penyusunan Skripsi. 2017. Pontianak : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TanjungPura.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- . 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. <http://eprints.undip.ac.id/24312/1/Muazaroh-01.pdf>. Diakses pada 18 Agustus 2020.
- . 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Wahab, Solichin, 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Media Presindo: Yogyakarta.

Dokumen

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12
Tahun 2017 Tentang
Penyelenggaraan Imunisasi.

Jurnal Online

Ervina, Lisa. 2013. Gambaran pelaksanaan program posyandu dan kelengkapan status imunisasi balita di desa Suak Ribee Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat.

http://repository.utu.ac.id/641/1/BA%20I_V.pdf Diakses pada 18 Agustus 2020.

Muazaroh. 2009. Analisis Implementasi program imunisasi HB-0 oleh bidan desa di Kabupaten Demak.

